

Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Terhadap PSAK No.216 Pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur

¹Desy Ulina Manurung*, ²Hendrik E.S Samosir, ³Magdalena J.Siringo ringo

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Medan

¹desi.ulina@student.uhn.ac.id

Submit : 07 Sept 2025 | Diterima : 16 Sept 2025 | Terbit : 18 Sept 2025

ABSTRACT

This study aims to determine whether the implementation of fixed asset accounting at PT PLN (Persero) Customer Service Unit (ULP) Medan Timur complies with PSAK No. 216. The research applies a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that fixed assets are recognized at acquisition cost, including purchase price and all expenses incurred until the asset is ready for use, and recorded after the issuance of the Handover Report (BASTB/BASTP). Subsequent measurement adopts the cost model with the straight-line depreciation method. Post-acquisition expenditures are classified into capital expenditures, which are capitalized, and revenue expenditures, which are directly expensed. Derecognition of assets occurs when assets are disposed of, donated, or no longer provide economic benefits, while presentation and disclosure are based on book value in the financial statements. These findings support Suwardani et al. (2018), who concluded that PLN in North Sumatra generally complied with PSAK, and contrast with Bakri & Adriani (2020), who found that PLN Makassar Selatan still applied the declining balance method. Therefore, it can be concluded that PT PLN (Persero) ULP Medan Timur has implemented fixed asset accounting in accordance with PSAK No. 216.

Keywords: PSAK 216, Fixed Assets, Accounting, Depreciation, PLN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Timur telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 216. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap dilakukan sebesar biaya perolehan, meliputi harga beli dan seluruh biaya hingga aset siap digunakan, serta diakui setelah adanya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BASTB/BASTP). Pengukuran setelah pengakuan menggunakan model biaya (cost model) dengan metode penyusutan garis lurus. Pengeluaran setelah perolehan dibedakan menjadi capital expenditure yang dikapitalisasi dan revenue expenditure yang langsung dibebankan. Penghentian aset tetap dilakukan jika aset dilepas, disumbangkan, atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomis, sedangkan penyajian dan pengungkapan dilakukan sesuai nilai buku dalam laporan posisi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Suwardani et al. (2018) mengenai kesesuaian penerapan PSAK pada PLN Sumatera Utara, serta berbeda dengan penelitian Bakri & Adriani (2020) di PLN Makassar Selatan yang masih menggunakan metode saldo menurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap di PT PLN (Persero) ULP Medan Timur telah sesuai dengan PSAK No. 216.

Kata kunci: PSAK 216, Aset Tetap, Akuntansi, Penyusutan, PLN

PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan karena memiliki nilai signifikan serta umur manfaat yang panjang. Keberadaan aset tetap

mendukung kegiatan operasional perusahaan, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun pelayanan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, aset tetap harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi agar laporan yang dihasilkan relevan, andal, dan dapat dibandingkan. PSAK 216 memberikan pedoman akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, hingga penyajian dan pengungkapannya (Roby Renaldo et al., 2024).

Bakri (2020) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap pada PT PLN(PERSERO) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Area Makassar Selatan menyimpulkan PT PLN (Persero) Area Makassar Selatan menjalankan kegiatan akuntansi berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan yang telah mengarah pada PSAK 16. Perusahaan menyusutkan aset tetapnya dengan menggunakan metode saldo menurun dimana tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, Perusahaan menghentikan aset tetap yang tidak terbiasa dengan cara menghapus aset tetap dari daftar dan menghapusnya dengan cara kepemilikan diberikan

Sebagai perusahaan milik negara, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban menerapkan standar akuntansi secara konsisten, termasuk dalam pencatatan aset tetap di unit-unitnya. ULP Medan Timur, sebagai salah satu unit layanan pelanggan, mengelola aset yang cukup besar seperti bangunan, instalasi jaringan listrik, kendaraan operasional, dan peralatan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap di PT PLN (Persero) ULP Medan Timur dengan PSAK 216, serta memberikan gambaran mendetail mengenai praktik yang dilakukan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut PSAK No. 216 (PSAK 16), aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Manik & Firdaus,(2024) klasifikasi aset tetap,yaitu:

a. Aset Tetap Berwujud (tangible assets)

Aset tetap berwujud memiliki bentuk fisik dan dapat diamati dengan suatu alat tau lebih panca indra dan memiliki karakteristik umum, yaitu memberi manfaat ekonomis pada masa mendatang bagi Perusahaan, Adapun jenis aset tetap berwujud ini dikategorikan sebagai berikut tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan.

b. Aset Tetap Tak Berwujud (Intangible Assets)

Aset tetap tak berwujud merupakan aset tak lancar (noncurrent assets) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain (Anasta et al., 2023). Adapun jenis aset tak berwujud ini dikategorikan yaitu paten, hak cipta, hak eksklusif yang mengizinkan seseorang untuk menjual, memberi izin atau mengendalikan pekerjaannya, merk dagang, dan goodwill.

Penelitian yang dilakukan oleh Bakri dan Adriani pada tahun 2020 (Bakri, 2020) mengenai penerapan akuntansi aktiva tetap pada PT PLN (Persero) wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar, khususnya area Makassar Selatan, menyimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan akuntansi berdasarkan kebijakan akuntansi internal yang mengarah pada PSAK 16.

Sementara itu, penelitian oleh Suwardani, Eli Safrida, Sri Mahyuni, dan Deliana pada tahun 2018 yang meneliti PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap di perusahaan tersebut telah berpedoman pada PSAK No. 16.

Selanjutnya, penelitian oleh Muh. Syahril Rustam, Arsyad Paweroi, dan Astuty Hasti pada tahun 2020 terhadap PT Tri Putra Sejati Makassar menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan akuntansi aset tetap sebagaimana yang direkomendasikan oleh PSAK No. 16. Hal ini terbukti dari laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan ketidaksesuaian keseimbangan antara laba dan rugi.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian pada penelitian ini adalah analisis perlakuan akuntansi terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan serta penghentian pengakuan aset tetap pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur dengan Aset Tetap (PSAK 216).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Adapun tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah mengumpulkan data perusahaan meliputi profil perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, sejarah perusahaan dan laporan keuangan perusahaan, melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan, mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk dianalisis kesesuaian penerapan akuntansi sesuai dengan Aset Tetap (SAK 16) dan membuat kesimpulan dari hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Robby Sepriadi selaku manajer bagian layanan dan jaringan di PT. PLN ULP Medan Timur diketahui bahwa perusahaan memiliki beberapa aset tetap yakni tanah/bangunan, mesin dan kendaraan. Cara yang digunakan dalam menghitung nilai sisa aset tetap adalah dengan cara mengurangi nilai historis aset dengan jumlah penyusutan yang telah dibayarkan. Adapun cara untuk mengukur nilai akumulasi penyusutan suatu aset tetap pada PT. PLN ULP Medan Timur adalah berdasarkan nilai historis aset tersebut, yaitu harga beli atau nilai perolehan aset, kemudian menentukan metode penyusutan apa yang digunakan, contohnya metode garis lurus atau metode saldo menurun, setelah itu menentukan jumlah periode penyusutan yang akan dilakukan, yaitu selama manfaat ekonomis aset tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara juga ditemui bahwa penyebab penyusutan aset tetap dikarenakan berkurangnya nilai kegunaan aset tetap yang disebabkan karena adanya pemakaian aset tetap tersebut. Adapun yang menjadi kriteria pengukuran aset tetap adalah 1. berwujud; 2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

Penyusutan, Pengeluaran Setelah Perolehan, dan Penghentian Aset Tetap

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan metode garis lurus (straight line method) dalam menghitung penyusutan aset tetap. Narasumber menyebutkan bahwa metode ini dipilih karena menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahun, sehingga memudahkan dalam perencanaan biaya dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, penyusutan terjadi karena faktor pemakaian dan berkurangnya fungsi aset seiring berjalannya waktu. Dengan metode garis lurus, perusahaan berusaha mencerminkan alokasi biaya aset tetap secara sistematis selama umur manfaatnya. Untuk pengeluaran setelah perolehan, perusahaan membedakan menjadi dua:

- a. Capital expenditure (pengeluaran modal) → misalnya penambahan gedung, renovasi besar, atau perbaikan signifikan kendaraan dan mesin. Biaya ini dikapitalisasi ke nilai aset tetap dan disusutkan sesuai umur ekonomis baru.
- b. Revenue expenditure (pengeluaran pendapatan) → mencakup biaya pemeliharaan rutin, perbaikan kecil, atau penggantian suku cadang biasa. Biaya ini tidak meningkatkan manfaat ekonomis di masa depan sehingga langsung dibebankan pada laporan laba rugi.

Dalam hal penghentian aset tetap, narasumber menjelaskan bahwa penghentian dilakukan bila aset: dilepas (dijual atau disumbangkan), atau sudah tidak memberikan manfaat ekonomi masa depan. Pada saat penghentian, perusahaan menghapus nilai buku aset dengan mendebit akumulasi penyusutan dan mengkredit akun aset tetap. Bila terdapat selisih antara nilai buku dan hasil pelepasan, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi pelepasan aset. Interpretasi menunjukkan bahwa kebijakan penyusutan, perlakuan pengeluaran, dan penghentian aset tetap di PT PLN ULP Medan Timur sudah konsisten dengan PSAK 216, sehingga dapat dikatakan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Penyajian, Pengungkapan, dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Dalam laporan posisi keuangan, aset tetap disajikan pada bagian aktiva tetap dengan nilai book value (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai). Sedangkan beban penyusutan diakui sebagai beban operasi dalam laporan laba rugi setiap tahunnya.

Hasil observasi laporan keuangan menunjukkan bahwa penyajian aset tetap di PT PLN ULP Medan Timur telah sesuai dengan prinsip keterandalan dan relevansi, karena memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi aset perusahaan. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

Penelitian Suwardani, Eli Safrida, Sri Mahyuni, & Deliana (2018) menyatakan bahwa penerapan akuntansi aset tetap di PLN Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah berpedoman pada PSAK, meskipun masih perlu perbaikan dalam revaluasi dan pengungkapan aset tetap. Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut karena PLN ULP Medan Timur juga menerapkan PSAK dengan konsisten.

Penelitian Bakri & Adriani (2020) di PLN Area Makassar Selatan menunjukkan bahwa perusahaan masih menggunakan metode saldo menurun dalam penyusutan, yang tidak sesuai PSAK. Hal ini berbeda dengan PLN ULP Medan Timur yang sudah menggunakan metode garis lurus, sehingga lebih tepat dan sesuai dengan standar.

Penelitian Rustam, Paweroi, & Hasti (2020) pada PT Tri Putra Sejati Makassar menunjukkan perusahaan belum sepenuhnya menerapkan PSAK terkait aset tetap. Hal ini kembali memperlihatkan bahwa PLN ULP Medan Timur lebih patuh terhadap standar.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti bahwa PT PLN (Persero) ULP Medan Timur telah menerapkan akuntansi aset tetap secara konsisten dengan PSAK 216, baik dalam pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, maupun penyajiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) ULP Medan Timur, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan pengakuan aset tetap sesuai dengan ketentuan PSAK 216, yaitu diukur sebesar biaya perolehan dan diakui setelah adanya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BASTB/BASTP). Setelah pengakuan, pengukuran dilakukan dengan model biaya, yakni biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Dalam hal penyusutan, pengeluaran, dan penghentian, perusahaan menggunakan metode garis lurus (straight line), dengan perlakuan pengeluaran setelah perolehan dibedakan antara capital expenditure yang dikapitalisasi dan revenue expenditure yang langsung dibebankan. Penghentian aset tetap dilakukan ketika aset tidak lagi memberikan manfaat ekonomis, dilepas, atau disumbangkan, sesuai ketentuan PSAK 216. Dari sisi penyajian dan pengungkapan, aset tetap disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai buku (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan), sedangkan beban penyusutan dicatat dalam laporan laba rugi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PLN ULP Medan Timur telah menerapkan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAK 216, sejalan dengan penelitian sebelumnya di PLN wilayah Sumatera Utara, namun berbeda dengan temuan di PLN Makassar Selatan yang belum sepenuhnya konsisten dalam penerapannya.

REFERENSI

- Al Haryono Jusup. 2017. Dasar akuntansi keuangan. Yogyakarta: YKPN
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan Akuntansi Keuangan Terbaru, Andi Yogyakarta, 2017
- Bakri & Adriani. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Area Makassar Selatan. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 27–32. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1894>
- Cenik Ardana, Hendro Lukman, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi pertama, Jakarta, 2016
- Diana, A., Setiawati, L., (2017). Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Hery, S.E, M.Si, Akuntansi Aktiva, Uang dan Modal, Edisi 2, Gaca Media, Yogyakarta, 2016
- Hery dan W Lekok 2016 Akuntansi Keuangan Menengah 2. Cetakan ke-3 Jakarta; Bumi aksara
- Harahap, S. (2017). Akuntansi Intermediate: Konsep dan Aplikasi (revisi : Bi.M.Perintis (ed.) ; kedua). Jusuf, H. (2009). Aktiva Tetap 1.

-
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 16: Aset Tetap. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, et al. (2018). Third Edition Intermediate Accounting IFRS Edition. United. States. Wiley. Republik Indonesia.
- Marisi P. Purba .Akuntansi Keuangan Aset Berwujud,Penerbit Graha Ilmu,Medan 2016
- Martani,D.dkk.(2019) Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK .Buku 1, Jakarta:Salemba empat
- Mulyadi, M. (2014). Pengantar Akuntansi (4th ed.). BPE Universitas Gadjah Mada.
- Sofyan Syarif Harahap ,Teori Akuntansi ,Edisi Revisi, Cetakan Kedua Belas ,Jakarta 2018
- Surmarsan ,Thomas .(2017). Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua . penerbit Indks.